

**PENGARUH *SIZE*, *WEALTH*, *LEVERAGE*, DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)**

**Pipit Nur Fitasari<sup>1</sup>  
Kun Ismawati<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

e-mail: <sup>1</sup>[pipitnurfitasarif10@gmail.com](mailto:pipitnurfitasarif10@gmail.com) ; <sup>2</sup>[kun.ismawati@gmail.com](mailto:kun.ismawati@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to know size, wealth, leverage, and capital expenditure influence to the government financial performance in Karanganyar district both in Partial or simultaneous. Hypothesis suspected that size, wealth, and capital expenditure have a positive and significant influence to the government financial performance in Karanganyar district, whereas leverage has negative effect but not significant to the government financial performance in Karanganyar district.*

*This research is a quantitative research with secondary data collected from Regions Financial Body (BKD) Karanganyar district in the form of balance sheet and financial statement in period research years 2010-2017. Analysis of data used in the research are multiple linear regression test, t test, F test, and coefficient determination test. Results data analysis shows that leverage and capital expenditure takes a negative and not significant effect to the government financial performance in Karanganyar district years 2010-2017, whereas size and wealth have positive and significant effect to the government financial performance in Karanganyar district years 2010-2017.*

*Keywords: Size, Wealth, Leverage, Capital Expenditures, and Government Financial Performance.*

**PENDAHULUAN**

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi bertujuan untuk mengutamakan sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah (Ruslan, 2013). Kendala yang dihadapi oleh pemerintah

daerah dalam menyusun laporan keuangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah (Susantih dan Saftiana, 2010:4).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan pemerintah (Halim, 2012:20). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terutama dalam aspek keuangan dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Indrawan, 2013).

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar”.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menganalisis pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

### **Landasan Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan karena adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh masyarakat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Jensen dan Meckling, 1976).

Halim (2012: 232) menyatakan, “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi

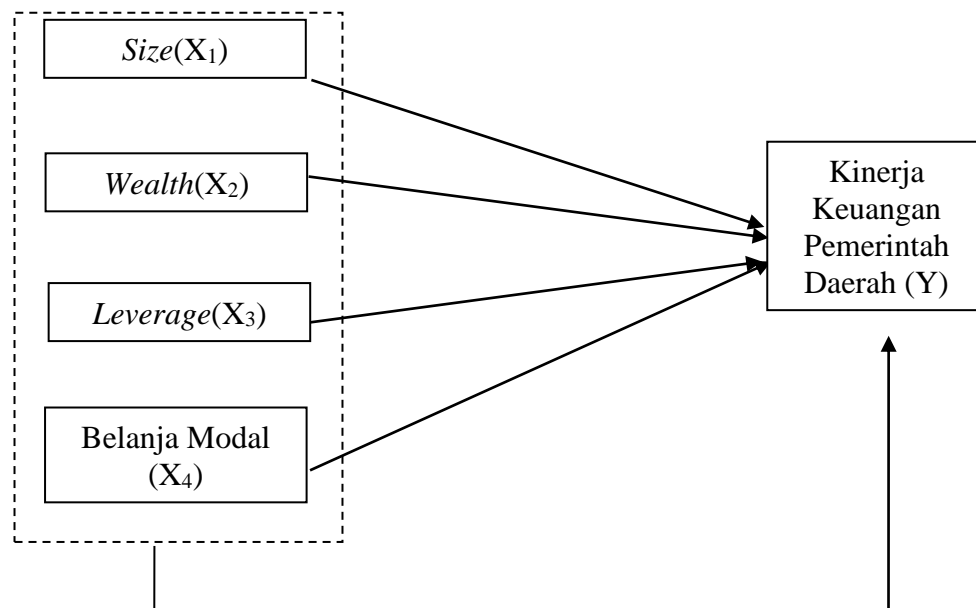
yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial.

Minarsih (2015) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pemerintah yang mempunyai ukuran kecil. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangannya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Strategi investasi pada pasar yang dinamis mengasumsikan bahwa investor akan mencoba untuk memaksimalkan *wealth* yang absolut (Lo, et al, 2017: 2). *Wealth* dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2009). Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah bagi pembiayaan pembangunan dan usahanya untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

*Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage*, maka akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, sehingga akan menunjukkan kinerja yang rendah. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan oleh pemerintah bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal, dan menanggung beban melainkan juga untuk memperbesar penghasilan (Kusumawardani, 2012).

PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran, menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah akibat adanya belanja merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik.

**Kerangka Pemikiran**

Gambar II.I  
Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *size*, *wealth*, *leverage* dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Size*, *wealth*, *leverage* dan belanja modal yang diduga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.  $H_a : \beta_1 \neq 0$ , diduga *Size* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
2.  $H_a : \beta_1 \neq 0$ , diduga *Wealth* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
3.  $H_o : \beta_1 = 0$ , diduga *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
4.  $H_a : \beta_1 \neq 0$ , diduga Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

5.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , diduga *size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
6.  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , diduga *size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar berupa neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi sampel dengan periode penelitian tahun 2010-2017. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t secara parsial yang menunjukkan nilai positif yaitu  $t_{hitung}$  sebesar 3,283 dengan signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05.

2. Pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa *wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t secara parsial yang menunjukkan nilai positif yaitu  $t_{hitung}$  sebesar 4,054 dengan signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05.

3. Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t secara parsial yang menunjukkan nilai negatif yaitu  $t_{hitung}$  sebesar -0,747 dengan signifikansi sebesar 0,489 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05.

4. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t secara parsial yang menunjukkan nilai negatif yaitu  $t_{hitung}$  sebesar -0,710 dengan signifikansi sebesar 0,510 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05.

5. Pengaruh *size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa *size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017. Hal ini dari hasil uji F yang mempunyai hasil negatif yaitu  $F_{hitung}$  sebesar 4,907 dengan signifikansi 0,059 yang berarti lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05, berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Berdasarkan hasil print out SPSS, maka dapat diketahui besarnya pengaruh ditunjukkan oleh hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,624 yang artinya variabel independen *size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017 sebesar 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

### Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017.
2. *Wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017.
3. *Leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017.
4. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017.
5. *Size*, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2017.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen jenis-jenis penerimaan daerah lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2009. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2009.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, Y. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin*.

- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Lo, Andrew W; Orr H Allen; Zhang R. 2017. The Growth of Relative Wealth and the Kelly Criterion. *JEL Classification: G11, G12, D03, D11, SSRN*. September 2017.
- Minarsih, R. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. (Skripsi. Universitas Negeri Semarang).
- Ruslan, Heri. (2013). *Ini 10 kabupaten dan kota daerah otonom terbaik*. 17 Mei 2016. [www.republica.co.id](http://www.republica.co.id)
- Susanti, Asri Diah. 2010. *Demand Supply dan Praktik Social Disclosure di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasi.